

Faktor-Faktor Kekalahan Petahana dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang

M. Rafi Ariansyah^{1*}, Evsa Wulan Suri², Gusmira Wita³, Maichel Firmansyah⁴

^{1,2}Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. ^{3,4}Univeersitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: mrafiariansyah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan petahana dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang . Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi dan wawancara, Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebab teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sehingga data tersebut dapat dipercaya. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tentang faktor-faktor kekalahan petahana dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang yaitu 1. Kepemimpinan yang tidak berhasil, 2. Terlalu percaya diri, 3. Pelayanan public yang buruk, dan 4. Tingkat pengangguran 5 tahun terakhir yang tinggi.

Kata Kunci: Faktor-Faktor; Kekalahan Petahana; Kontestasi Pilkada.

Abstract

This study aims to determine the factors that cause the defeat of the incumbent in the 2024 Pilkada contest in Padang City. This type of research is qualitative research using descriptive methods, the data collection method in this study is by using observation and interviews, the researcher uses the source triangulation technique because the technique of checking the validity of data that utilizes something other than the data so that the data can be trusted. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study on the factors of the incumbent's defeat in the 2024 Pilkada contest in Padang City are 1. Unsuccessful leadership, 2. Overconfidence, 3. Poor public services, and 4. High unemployment rate in the last 5 years.

Keywords: Factors; Incumbent Defeat; Pilkada Contestation.

How to Cite: Ariansyah, M.R. et al. (2024). Faktor-Faktor Kekalahan Petahana dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1 (2), 101-109.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Menurut Prof.Hafied Cangara (2016) “Rendahnya partisipasi masyarakat terjadi karena adanya beberapa keterkaitan dengan masyarakat seperti masyarakat yang menjadi apatis dikarenakan para calon Kepala Daerah melakukan korupsi dan memberikan janji-janji palsu, karakter yang ditunjukkan para anggota eksekutif maupun legislatif tidak mencerminkan perilaku teladan, contohnya narkoba, mafia proyek, money politic, dan lain sebagainya”. Money politics bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Bisa jadi proses demokrasi yang berlangsung selama pilkada akan menghasilkan pemimpin yang rendah kualitasnya, karena pengaruh politik uang, atau berlangsung dalam situasi yang penuh tekanan (Amirudin & Bisri, 2006). Kemudian adanya kekecewaan masyarakat terhadap Pemilihan Kepala Daerah di tahun lalu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dikarenakan Pemilihan Kepala Daerah ini hanya menarik bagi bagi para penikmat pilkada yakni para aktor politik, peserta pemilu, KPU, Bawaslu, dan petugas TPS sehingga tak jarang para calon kepala daerah ini tidak menepati janjinya pada saat sebelum dilantik menjadi Kepala Daerah. Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah sangat mempengaruhi keberhasilan pemilihan itu sendiri sehingga menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada upaya menjaga tingkat partisipasi ini agar meningkat dari waktu ke waktu.

Setiap pemimpin yang sudah memegang kekuasaan pasti memiliki keinginan agar kekuasaannya langgeng dan memiliki durasi kekuasaan yang lama, namun tidak semua keinginan dalam melanggengkan kekuasaan itu dapat terwujud dikarenakan pendidikan dan pengetahuan politik dimasyarakat hari ini sudah berkembang dan memiliki kemajuan. Pemimpin yang sudah memiliki legitimasi kekuasaan dituntut bekerja dengan serius dan mampu menunaikan janji-janji kampanyenya agar diperiode selanjutnya mampu kembali mendapatkan kepercayaan untuk kembali memimpin daerahnya (Ariansyah, 2024).

Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 diselenggarakan secara serentak dalam tahun yang sama (Asikin, 2022). Kegiatan kampanye dan debat dari masing-masing pasangan calon sudah terlaksana, semua informasi dan pesan tersebar luas dan terangkum dalam program-program acara televisi yang melihatkan realitas politik dan sosial kepada audiensnya. Televisi sebagai media massa berperan besar dalam memahami dunia dan realitanya, televisi juga merekonstruksi kehidupan melalui persepsi “dunia secara keseluruhan” (Hadriyotopo, 2018).

Seperti diketahui, Pilkada Padang 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1 Fadly Amran-Maigus Nasir yang diusung oleh koalisi besar yang

terdiri dari Partai Nasdem, Golkar, PKB, PDI-P, PPP, dan Ummat. Fadly Amran adalah mantan Wali Kota Padang Panjang sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem Sumatera Barat. Sementara itu, Maigus Nasir, calon wakilnya, merupakan mantan anggota DPRD Sumatera Barat. Pasangan nomor urut 2, Muhammad Iqbal-Amasrul, diusung oleh Partai PKS dan Partai Demokrat. Iqbal merupakan politisi dari PKS, sedangkan Amasrul adalah mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Padang. Pasangan nomor urut 3, Hendri Septa-Hidayat, diusung oleh PAN dan Gerindra. Hendri Septa, yang merupakan petahana, juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Padang, sementara Hidayat adalah mantan anggota DPRD Sumatera Barat.

Petahana Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Hendri Septa, yang berpasangan dengan Hidayat, mengalami kekalahan dalam Pilkada Padang 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang selanjutnya pasangan nomor urut 3 tersebut hanya memperoleh 27,8 persen suara, setara dengan 88.859 suara dan dinyatakan kalah dalam pelaksanaan kontestasi Pilkada Kota Padang. Sementara itu, pendatang baru Fadly Amran-Maigus Nasir berhasil keluar sebagai pemenang. Pasangan nomor urut 1 ini meraih 55,2 persen suara, atau sebanyak 176.648 suara. Pasangan lainnya, Muhammad Iqbal-Amasrul, yang merupakan pasangan nomor urut 2, mendapatkan 17,1 persen suara, atau sebanyak 54.685 suara.

Banyak pemimpin hari ini ketika memegang kekuasaan lupa dalam menunaikan janji-janji kampanyenya dan bekerja tidak serius untuk rakyatnya sehingga kepemimpinannya mendapatkan banyak kekecewaan dari masyarakat yang dipimpinnya alhasil mendapatkan hukuman yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, hukuman itu adalah kekalahan kontestasi pilkada tahun 2024 dimana masyarakat tidak lagi mempercayainya untuk memimpin daerah tersebut seperti yang terlihat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang.

Kepemimpinan Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 yaitu Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Hendri Septa pada awal kepemimpinannya sudah tidak menunjukkan etika kepemimpinan yang baik kepada masyarakat Kota Padang dimana Walikota Mahyeldi memutuskan maju menjadi Gubernur Sumatera Barat berpasangan dengan Audy Joinaldi sebagai Wakil Gubernur, dari kejadian ini saja public dan masyarakat sudah menilai bahwasanya kepemimpinan Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 tidak memiliki etika dan komitmen yang baik dalam memimpin. Tidak itu saja, Wakil Walikota Padang wHendri Septa otomatis langsung menjadi PLT Walikota Padang dan pada akhirnya dilantik menjadi Walikota Padang. Selama menjadi Walikota Padang, Hendri Septa

sebagai Walikota Padang pada akhirnya juga tidak menunjukkan kepemimpinan yang baik kepada masyarakat Kota Padang, hal ini terlihat dari kekosongan kursi Wakil Walikota Padang dalam rentan waktu yang sangat lama dimana yaitu kurang lebih 2 tahun kursi kepemimpinan Wakil Walikota Padang kosong dan tidak terisi.

Pengamat Politik Kota Padang, M Rafi Ariansyah menyebutkan bahwa memimpin Kota Padang tidak bisa sendiri, ini sudah hampir 2 tahun Kota Padang tidak memiliki Wakil Walikota artinya kepemimpinan ini tidak akan berjalan efektif kalau hanya dijalankan oleh Walikota saja tanpa didampingi oleh Wakil Walikota. Ini adalah bentuk kemerosotan demokrasi yang sedang dipertontonkan kepada masyarakat oleh Hendri Septa. Masyarakat Kota Padang akan berfikir ulang kembali nanti di Tahun 2024 untuk menetapkan pilihannya pada Hendri Septa, hukuman itu akan setimpal nanti dibalas oleh kekecewaan masyarakat, Hendri Septa masih memiliki waktu kurang lebih 2 tahun lagi untuk memperbaiki kepemimpinannya jikalau masih mau menduduki kursi Walikota Padang pada periode 2024-2029 mendatang, kalau ini tidak diperbaiki kita tunggu saja kekalahan Hendri Septa pada kontestasi Pilkada Tahun 2024 nanti (Ungkap Rafi saat diwawancara oleh Padang TV pada 14 November 2022).

Berdasarkan hasil survey yang dikeluarkan oleh consultan penelitian pada 25 Oktober 2024 didapatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Walikota Padang Hendri Septa hanya berkisar 57 persen. Salah satu indikator yang menjadi alat ukur kegagalan Hendri Septa memimpin Kota Padang yaitu pembukaan lapangan kerja yang rendah dan angka pengangguran Kota Padang yang tergolong cukup tinggi selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan-permasalahan penelitian yang dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Kekalahan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi dan wawancara, untuk mendapatkan data yang kredibilitas tinggi maka penelitian ini digunakan dalam bentuk pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebab teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sehingga data tersebut dapat dipercaya. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Adapun faktor-faktor kekalahan petahana dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang antara lain, sebagai berikut:

Kepemimpinan yang tidak berhasil

Kepemimpinan yang tidak berhasil ditunjukkan oleh Walikota Padang, selama memimpin melalui Satpol PP begitu banyak terjadi pengusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap para pelaku usaha dan UMKM yang ada di Kota Padang. Selain itu, selama kurang lebih dari 2 tahun memimpin Kota Padang Hendri Septa tidak didampingi oleh Wakil Walikota, perebutan kursi Wakil Walikota yang cukup panas dan terjadi tarik ulur diantara partai yang berkoalisi, kondisi ini membuat partai koalisi cukup bimbang menentukan nama Wakil Walikota.

Memimpin sebuah kota atau daerah tidak bisa sendiri harus memiliki pasangan Wakil Walikota yang punya basic kepemimpinan yang mampu menjadi pelengkap, kurang lebih dari 2 tahun Kota Padang tidak memiliki Wakil Walikota tentu kepemimpinan ini disebut sebagai kepemimpinan yang tidak berhasil dan tidak efektif dikarenakan Walikota Padang, Hendri Septa terlalu memaksakan diri untuk memimpin Kota Padang secara sendiri.

Berdasarkan pernyataan dari salah satu masyarakat Kota Padang yaitu Rifki Fernanda Sikumbang selaku mantan pengurus DPP KNPI Nasional menyampaikan bahwa Kota Padang butuh pemimpin yang serius dalam memimpin, saya melihat bahwa figur Hendri Septa dirasa bukanlah figur yang unik karena beliau merupakan representatif dinasti politik di Kota Padang, selain itu figur Hendri Septa memiliki keegoisan yang tinggi dalam memimpin Kota Padang hal ini dibuktikan oleh selama 2 kurang lebih dari 2 tahun memimpin Kota Padang secara sendiri dan seolah-olah tidak membutuhkan sosok Wakil.

Terlalu percaya diri

Pada pelaksanaan Pilkada 2024, Hendri Septa yang berpasangan dengan Hidayat dinilai terlalu percaya diri sebagai petahana akan bisa memenangkan Kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang. Pasangan ini kurang mengukur sejauh mana masyarakat puas atas kepemimpinannya pada 5 tahun terakhir.

Kota Padang memiliki permasalahan yang cukup kompleks disetiap bidang namun kepemimpinan 5 tahun terakhir yang dijalankan oleh Hendri Septa penuh dengan kontradiktif dan kritikan dimasyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Anwar Karim yang merupakan seorang Pengamat Politik Nasional

menyampaikan bahwa memimpin Kota Padang tidak bisa sendiri, Hendri Septa terlalu percaya diri memimpin Kota Padang dengan sendiri dalam waktu yang cukup lama, masyarakat sangat menantikan siapa sosok figur yang akan menduduki kursi Wakil Walikota, namun kepemimpinan Hendri Septa memiliki ego yang luar biasa dikarenakan terlalu lama dalam mengambil keputusan itu. Sikap terlalu percaya diri inilah yang kemudian membuat Pasangan Hendri Septa-Hidayat gagal memenangkan kontestasi Pilkada 2024.

Pelayanan public yang buruk

Selama kepemimpinan Hendri Septa juga tidak lepas dari permasalahan pelayanan public yang buruk, hal ini cukup mendapatkan kritikan dari para pemuda dan organisasi kepemudaan di Kota Padang yaitu perihal penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi sampah yang diberlakukan pada tanggal 1 Agustus Tahun 2024.

Retribusi Sampah ini diinclude-kan oleh Pemerintah Kota Padang melalui PDAM Kota Padang, semulanya pembayaran retribusi sampah hanya diterapkan dalam bentuk 1 klaster saja dan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pungutan retribusi sampah yang baru yang tertuang pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 dibagi menjadi 4 klaster tagihan yaitu terdiri dari rumah tangga kelas miskin Rp.19.550, rumah tangga kelas bawah, Rp.24.437, rumah tangga kelas menengah, Rp.34.212, rumah tangga kelas atas, Rp.55.904.

Jadi klaster-klaster tagihan retribusi sampah ini pembayarannya langsung melalui tagihan PDAM, ini jelas merupakan praktek maladministrasi karna tidak sinkron rasanya kalau retribusi sampah dipungut oleh PDAM karna secara tupoksi ini merupakan tugas yang seharusnya dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Bukan itu saja, kenaikan retribusi sampah yang dikategorikan menjadi 4 klaster merupakan sebuah akal-akalan dari Pemerintah Kota Padang dalam mencari tambahan pendapatan APBD, kebijakan ini juga tidak disosialisasikan secara menyeluruh dan tiba-tiba diterapkan begitu saja.

Tingkat pengangguran 5 tahun terakhir yang tinggi

Tingkat pengangguran di Kota Padang pada 5 tahun terakhir cukup tinggi, berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Kota Padang pada tahun 2024 ditemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Padang pada tahun 2024 adalah 9,88%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasaman Barat yang berada di posisi kedua dengan angka 6,34% dan Kabupaten Dharmasraya di posisi ketiga dengan angka 6,02%. TPT merupakan indikator untuk menghitung proporsi jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah sebutan untuk penduduk usia kerja berumur 15 tahun atau lebih yang tidak memiliki pekerjaan.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Padang pada tahun 2024 adalah 9,88%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasaman Barat yang berada di posisi kedua dengan angka 6,34% dan Kabupaten Dharmasraya di posisi ketiga dengan angka 6,02%. Hal ini membuktikan bahwa ketidakseriusan Walikota Padang dalam mengurangi angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan pada generasi anak muda usia produktif, ini menjadi indikator dan tolak ukur sebuah kegagalan kepemimpinan suatu daerah.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian tentang “Faktor-Faktor Kekalahan Petahana Dalam Kontestasi Pilkada 2024 di Kota Padang” antara lain, sebagai berikut :

- (1) Kepemimpinan yang tidak berhasil dikarenakan figur Hendri Septa dirasa bukanlah figur yang unik karena beliau merupakan representatif dinasti politik di Kota Padang, selain itu figur Hendri Septa memiliki keegoisan yang tinggi dalam memimpin Kota Padang hal ini dibuktikan oleh selama 2 kurang lebih dari 2 tahun memimpin Kota Padang secara sendiri dan seolah-olah tidak membutuhkan sosok Wakil. (2) Terlalu percaya diri, Hendri Septa terlalu percaya diri memimpin Kota Padang dengan sendiri dalam waktu yang cukup lama, masyarakat sangat menantikan siapa sosok figur yang akan menduduki kursi Wakil Walikota, namun kepemimpinan Hendri Septa memiliki ego yang luar biasa dikarenakan terlalu lama dalam mengambil keputusan itu. (3) Pelayanan public yang buruk, penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang retribusi sampah yang diberlakukan pada tanggal 1 Agustus Tahun 2024. Retribusi Sampah ini diinclude-kan oleh Pemerintah Kota Padang melalui PDAM Kota Padang, semulanya pembayaran retribusi sampah hanya diterapkan dalam bentuk 1 klaster saja dan dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pungutan retribusi sampah yang baru yang tertuang pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 dibagi menjadi 4 klaster tagihan yaitu terdiri dari rumah tangga kelas miskin Rp.19.550, rumah tangga kelas bawah, Rp.24.437, rumah tangga kelas menengah, Rp.34.212, rumah tangga kelas atas, Rp.55.904. Kenaikan retribusi sampah yang dikategorikan menjadi 4 klaster merupakan sebuah akal-akalan dari Pemerintah Kota Padang dalam mencari tambahan pendapatan APBD, kebijakan ini juga tidak disosialisasikan secara menyeluruh dan tiba-tiba diterapkan begitu saja (4) Tingkat pengangguran 5 tahun terakhir yang tinggi, berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Kota Padang pada tahun 2024 ditemukan

bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Padang pada tahun 2024 adalah 9,88%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pasaman Barat yang berada di posisi kedua dengan angka 6,34% dan Kabupaten Dharmasraya di posisi ketiga dengan angka 6,02%.

Daftar Pustaka

- Afrizal, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak.
- Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluaasi Keijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa
- Basri, S. (2018). Analisa dampak political trust dan political efficacy terhadap partisipasi politik calon pemilih pemula. *Jia Sandikta*, 4(5), 23-40
- Cholisin, C. (2009). Mengembangkan partisipasi warga negara dalam memelihara dan mengembangkan sistem politik indonesia. *Jurnal Civics*, 6(1), 29-44.
- Dalton, R. J. & Klingemann, H. (2009). *Political behavior*. New York: Oxford University Press.
- Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 51-59. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.68b>
- Indrayani, I. I. (2014). Mengkaji PR Politik: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Scriptura*, 4(2), 54-59.
- Intani, A. (2023). Pemilu Serentak Tahun 2024: Prediksi Partisipasi Politik Masyarakat Mengacu Pada Perbandingan Anggaran Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8).
- Jone, R., & On, Y. M. (2022). Strategi Komunikasi Petahana dalam mempertahankan Elektabilitas Pada Pilkada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 di Kecamatan Muara Lawa. *eJournal lmu Pemerintahan*, 10(4), 842-854
- Lampe, I. (2010). Konsep dan Aplikasi Public Relations Politik pada Kontestasi Politik di Era Demokrasi (Pemilihan Langsung). *Jurnal Akademika Fisip Untad*, 2(2), 469-485.

- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Makassar. *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 2(1), 120–128.
- Sastra, Y. (2023). Jumlahnya Mencapai 58,7 Persen, Pemilih Muda di Sumbar Sangat Menentukan. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/10/jumlahnya-mencapai-587-persen-pemilih-mudadi-sumbar-sangat-menentukan>
- Kaesmetan, O. T. H. (2019). Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan. *Journal KPU*, 1(1), 1-26.
- Yolanda, H. P., & Halim, U. (2020). Partisipasi politik online generasi z pada Pemilihan Presiden Indonesia 2019. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 10(2), 30-39.
- Yuningsih, N. A. I & Warsono (2014). Partisipasi politik remaja (pemilih pemula) pada Pemilu pada Mojokerto tahun 2010 di Desa Sumber Tanggul Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 1(2), 16– 30.
- Zulfa, A. N., Sari, E. P. P., & Trisiana, A. (2019). Meningkatkan kesadaran politik di kalangan anak muda. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1).